BAB III KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Distrik yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Distrik.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

Pasal 19

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 20

- a. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- b. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 21

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Distrik;
 - b. pengolahan administrasi kepegawaian Distrik;
 - c. pengolahan administrasi umum Distrik;
 - d. penyusunan data statistik dan pelaporan Distrik;
 - e. pelayanan umum di Distrik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Distrik.

Paragraf 2 Lurah

Pasal 23

Lurah mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. memberdayakan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 24

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Kelurahan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelurahan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan tugas Kelurahan; dan
 - d. membina tata usaha administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Paragraf 4
Seksi Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 25

Seksi Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pemerintahan dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan administrasi kependudukan dan pendaftaran penduduk;
- d. pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 5
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 26

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pengoordinasian pembinaan perekonomian masyarakat;
- c. pembinaan dan pengendalian pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- d. pengoordinasian dan pembinaan unit-unit usaha masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 6
Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengoordinasian pelayanan dan bantuan sosial masyarakat, pembinaan kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 28

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Lurah sebagai pelaksana sebagian tugas Kepala Distrik, dalam pelaksanaan tugasnya diselenggarakan oleh Sekretaris dan Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal.